KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG

Jl. Olo Bangau Nagari Kataping
Padang Pariaman Sumatera Barat
25586

Telp/Fax : (0751) 8950071

Email:balaikasumbar@gmail.com

Nomor : PR.005/1/9/BTP-P06/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Penyampaian Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2026 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Padang Pariaman, 15 Desember 2025

Yth. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target Kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

Sehubungan dengan hal tersebut Balai Teknik Perkeretaapian kelas II Padang telah melaksanakan penyusunan Dokumen RKT 2026, bersama ini terlampir disampaikan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2026 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan arahan lanjut Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian
Kelas II Padang

Ir. Hendrialdi, A.TD., M.T
NIP 197007291994031003

DJKA

2026
RENCANA KINERJA
TAHUNAN

BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN
KELAS II PADANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

RKT BTP Kelas II Padang Tahun 2026 merupakan penetapan terhadap rencana pencapaian sasaran dari program kerja yang dicanangkan pada tahun anggaran tersebut. Penyusunan dokumen RKT mencakup Program Infrastruktur Konektivitas dan Program Dukungan Manajemen dengan rencana kegiatan Pelayanan Transportasi Perkeretaapian, Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian, Infrastruktur Konektivitas Perkeretaapian, Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian, Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian, dan Layanan Hubungan Masyarakat.

Semoga Dokumen RKT Tahun 2026 dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan perkeretaapian agar semakin terarah menuju terwujudnya sistem pemerintahan yang baik.

Padang, Desember 2025

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Ir. Hendrialdi, A.T.D., M.T.
NIP 197007291994031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Dasar Hukum 1

1.2 Latar Belakang 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Organisasi dan Tusi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang 3

1.4.1 Subbagian Tata Usaha 5

1.4.2 Seksi Prasarana Perkeretaapian 5

1.4.3 Seksi Lalu Lintas, Sarana, Dan Keselamatan Perkeretaapian 5

1.4.4 Satuan Pelayanan 6

1.4.5 Kelompok Jabatan Fungsional 6

BAB II RENCANA STRATEGIS 7

2.1 Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 7

2.1.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2029 7

2.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional Dalam RPJMN 2025 - 2029 10

2.1.3 Strategi Pembangunan Nasional 12

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 14

2.2.1 Visi 14

2.2.2 Misi 15

2.2.3 Tujuan 16

2.2.4 Sasaran Strategis 19

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang 22

2.3.1 Visi 22

2.3.2 Misi 24

2.3.3 Tujuan dan Sasaran 25

2.3.4 Arah Kebijakan dan Stategi 26

2.3.5 Target Kinerja 28

2.4 Rencana Kerja (Renja) 2026 32

BAB III KONDISI/CAPAIAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN KONDISI/CAPAIAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN 36

3.1 Evaluasi Pembiayan/Pendanaan Perkeretaapian 36
3.2 Capaian Pembangunan Perkeretaapian 37
3.3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 39
3.4 Capaian Output Unit Kerja 41
BAB IV ReNCANA KINERJA TAHUNAN 42
4.1 Isu-isu Stategis Pembangunan Perkeretaapian 42
4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Perkeretaapian 43
4.3 Program Prioritas Pembangunan Perkeretaapian 45
4.4 Target Indikator Kinerja Kegiatan 45
4.5 Rencana Kinerja 53
4.6 Rencana Anggaran 64
BAB IV PENUTUP 66
LAMPIRAN 67

DAFTAR TABEL

Tabel. 2-1 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 Terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan 7
Tabel. 2-2 Arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJPN 2025-2029 12
Tabel. 2-3 Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 18
Tabel. 2-4 Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 20
Tabel. 2-5 Target Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025-2029 30
Tabel. 2-6 Rencana Kerja BTP Kelas II Padang Tahun 2026 32
Tabel. 3-1 Capaian Alokasi dan Realisasi Anggaran selama tahun 2020-2024 36
Tabel. 3-2 Realisasi Anggaran BTP Kelas II Padang Tahun 2025 37
Tabel. 3-3 Capaian Target Kinerja 2025 39
Tabel. 3-4 Capaian Output Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025 41
Tabel. 4-1 Program dan Kegiatan 2026 45
Tabel. 4-2 Formulasi Perhitungan Manual Indikator Kinerja Kegiatan 46
Tabel. 4-3 Target Kinerja Tahun 2025 - 2026 51
Tabel. 4-4 Wilayah Terkoneksi Transportasi Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang 54
Tabel. 4-5 Target Indikator Kinerja Rasio Konektivitas 54
Tabel. 4-6 Nilai Track Quality Index Periode Pengukuran ke – IV Tahun 2025 55
Tabel. 4-7 Target Indikator Kinerja TQI 55
Tabel. 4-8 Target Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang 57
Tabel. 4-9 Target Indikator Kinerja Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian 58
Tabel. 4-10 Target Indikator Nilai AKIP 60
Tabel. 4-11 Level Penilaian Tingkat Manajemen Risiko 61
Tabel. 4-12 Target Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko 61
Tabel. 4-13 Target Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran 62
Tabel. 4-14 Kategorisasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan 63
Tabel. 4-15 Target Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal 63
Tabel. 4-16 Target Indikator Kinerja Persentase Realisasi PNBP 64
Tabel. 4-17 Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2026 64
Tabel. 4-18 Alokasi Anggaran 2026 Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja 65

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1-1 Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang 4
Gambar. 2-1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 22
Gambar. 4-1 Nilai Alokasi Anggaran Tahun 2026 65

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. RKT merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Dalam penyusunannya, RKT harus diselesaikan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan, dan dapat dilakukan revisi atau penyesuaian apabila terdapat perubahan pada Renstra yang telah ditetapkan.

1.2 Latar Belakang

Pembangunan perkeretaapian akan berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional, maka kebijakan pengembangan transportasi ke depan akan sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian nasional. Arah kebijakan nasional terkait perkeretaapian dalam kurun waktu 2025 – 2029 adalah membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan membangun transportasi massal perkotaan dengan melakukan rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perkeretaapian yang berkelanjutan, guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Hal ini mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa perkeretaapian merupakan bagian integral dari sendi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keterkaitan ini dapat dijelaskan secara rinci bahwa usaha jasa perhubungan sebagai bagian integral dari kegiatan perekonomian bangsa, mengemban fungsi aksesibilitas ke seluruh wilayah tanah air sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam antisipasi kondisi tersebut, sistem transportasi perkeretaapian ditata dan terus disempurnakan dengan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga terwujud baik keandalan sarana dan prasarana untuk pelayanan maupun keterpaduan antar dan intramoda transportasi, serta disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijaksanaan tata ruang, pelestarian lingkungan hidup dan kebijaksanaan energi nasional agar selalu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntunan masyarakat serta kebutuhan usaha atau industri dengan memperhatikan keandalan maupun kelaikan sarana transportasi.

Menyadari akan peranan transportasi perkeretaapian yang sedemikian kompleks, maka dari itu diperlukan adanya kesamaan Visi, Misi, dan Persepsi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, baik arah maupun pengembangan ke depan nantinya. Oleh karena itu dibentuk Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian dengan tugas dan fungsi yang di atur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 217 Tahun 2021 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014, ditetapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan **penetapan dan pengukuran**, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang sebagai unit kerja Eselon III mandiri juga berkewajiban untuk menyelenggarakan

SAKIP. Penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis (Renstra), **Rencana Kinerja Tahunan**, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Rencana Kinerja Tahunan ini selanjutnya ditetapkan sebagai landasan awal perencanaan kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026 dimaksudkan untuk menetapkan target pencapaian kinerja terhadap rencana kegiatan dengan rencana kebutuhan anggaran pada setiap kegiatannya dengan berdasarkan kepada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun 2026 dengan mempertimbangkan Renstra sebagai landasan utama. Selain itu, dokumen ini merupakan wujud nyata komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil dengan perencanaan yang berkualitas.

1.4 Organisasi dan Tusi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian menggantikan PM 63 Tahun 2014. Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang mendapatkan tambahan tugas. Tugas Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang adalah melaksanakan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana dan keselamatan perkeretaapian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan prasarana perkeretaapian;
c. Pelaksanaan pengawasan kegiatan pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian yang dilaksanakan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian;

d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perlintasan sebidang sementara, perpotongan dan/atau persinggungan antara jalur kereta api dengan bangunan lain;
e. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan;
f. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
g. Pelaksanaan pengawasan keselamatan perkeretaapian
h. Pelaksanaan sosialisasi dan tindakan korektif pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian; dan
i. Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan; sumber daya manusia, hukum, organisasi, pengelolaan barang milik negara, hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang memiliki susunan struktur organisasi yang terdiri dari unit fungsi seksi teknis dan subbagian tata usaha sebagai sekretariat :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana;
3. Seksi Lalu – lintas, Sarana dan Keselamatan;
4. Satuan Pelayanan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

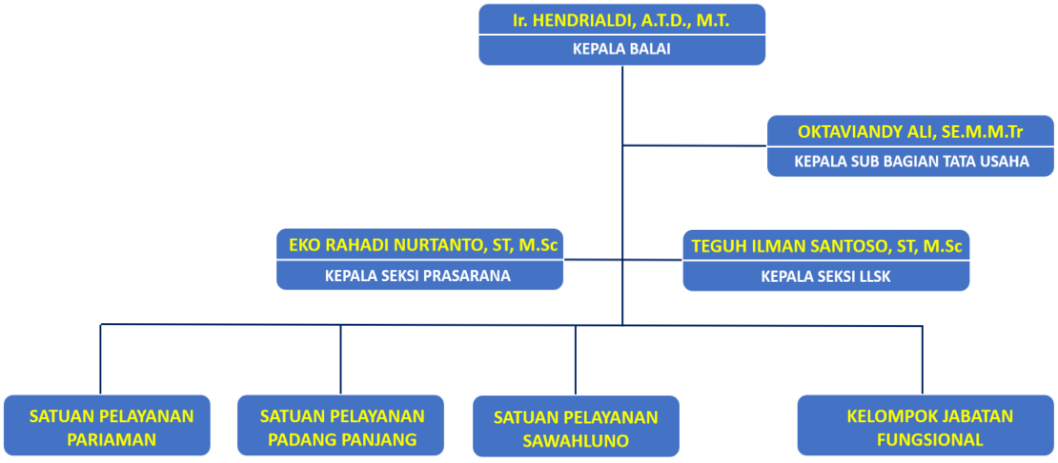

Gambar. 1-0-1 Struktur Organisasi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

1.4.1 Subbagian Tata Usaha

Tugas pokok dan fungsi di bidang kesekretariatan meliputi :

a. Menyusun bahan pengelolaan urusan tata usaha;
b. Menyusun bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
c. Menyusun bahan pengelolaan urusan kepegawaian;
d. Menyusun bahan pengelolaan urusan keuangan;
e. Menyusun bahan pengelolaan urusan hukum;
f. Menyusun bahan pengelolaan urusan kehumasan dan publikasi;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.4.2 Seksi Prasarana Perkeretaapian

Tugas pokok dan fungsi pengawasan dan peningkatan di bidang Prasarana Perkeretaapian meliputi :

a. Menyusun bahan pengawasan pembangunan dan peningkatan jalur dan bangunan kereta api;
b. Menyusun bahan pengawasan pembangunan dan peningkatan fasilitas operasi kereta api;
c. Menyusun bahan analisis prasarana kereta api;
d. Menyusun bahan pengawasan pelaksanaan perawatan prasarana (IMO) dan penggunaan (TAC);
e. Menyusun bahan pengelolaan database barang milik negara;
f. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.4.3 Seksi Lalu Lintas, Sarana, Dan Keselamatan Perkeretaapian

Tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Perkeretaapian meliputi :

a. Menyusun bahan pengawasan jaringan, lalu lintas, dan angkutan kereta api;
b. Menyusun bahan pengawasan keselamatan perjalanan dan kelaikan sarana kereta api;
c. Menyusun bahan analisis penanganan kecelakaan kereta api;
d. Menyusun bahan pengelolaan data dan pengusahaan perkeretaapian;
e. Menyusun bahan pencegahan dan penindakan pelanggaran perundang-undangan di bidang perkeretaapian;

f. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan lalu lintas, sarana dan keselamatan perkeretaapian;
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

1.4.4 Satuan Pelayanan

Tugas pokok dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang meliputi :

a. Melakukan sebagian tugas peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian;
b. Melakukan sebagian tugas pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian;
c. Melakukan sebagian tugas pengawasan keselamatan perkeretaapian.

1.4.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB II
RENCANA STRATEGIS

2.1 Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional

2.1.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025-2029

RPJMN Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045.

Detail sasaran pembangunan dan indikator pada level Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan disampaikan pada Tabel 2.5. Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat sasaran dan indikator pada level Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (Pro-P) yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan sebagai koordinator/pengampu maupun sebagai pendukung (detailnya dapat dilihat pada Lampiran II Perpres No 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

Tabel. 2-1 Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 Terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan

Prioriras Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
03-PN: Melanjutkan pengembangan infrasturktur dan meningkatkan lapnagan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui Peran Aktif Koperasi	01-Terwujudnya pengembangan infrastuktur yang berkelanjutan	01-Stok infrasturuktur terhadap PDB	%	43,00 (2019)	46,50	48,50

Prioriras Nasional (PN)	Sasaran PN	Indikator PN	Satuan	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029
04-PN: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknilogi, pendidikan, kesehatan, prestasi, olahraga,kesetaraan,gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	01-Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	04-Presentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi	%	66,40 (2023)	66,78	67,66
05-PN: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	02-Terwujudnya peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global	01-Biaya Logistik	%PDB	14,29 (2022)	13,52	12,50
07-PN: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	02-Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani	01-Indeks reformasi birokrasi nasional	Nilai	69,98	71,38	77,26

Sumber: Ditabelkan dari Perpres 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

Adapun penjelasan atas identifikasi Sasaran dan Indikator Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN 2025-2029 yang terkait Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

a. Sasaran pada PN3 dan PN5 terkait stok infrastruktur dan biaya logistik terkait dengan tugas Kementerian Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi (Pasal 5 Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan)
b. Sasaran pada PN4 terkait pendidikan yang berkualitas terkait dengan fungsi Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya

manusia transportasi (Pasal 6 Butir f. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan)

c. Sasaran pada PN7 terkait dengan reformasi birokrasi fungsi Kementerian Perhubungan dalam pemberian dukungan administrasi, pengelolaan BMN/Kekayaan Negara, dan pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Pasal 6 Butir c., d., dan e. Perpres No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan)

Berdasarkan Lampiran II dan Lampiran III RPJMN 2025–2029, Direktorat Jenderal Perkeretaapian memperoleh penugasan dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui indikator pada level Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Dalam kerangka tersebut, Kementerian Perhubungan berperan sebagai koordinator maupun pengampu pencapaian indikator, dengan total dukungan terhadap 37 indikator kinerja RPJMN 2025–2029. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 indikator kinerja diukur oleh Kementerian Perhubungan dan 5 indikator kinerja diukur oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun Direktorat Jenderal Perkeretaapian secara spesifik ditugaskan untuk mendukung pencapaian 7 indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan sektor perkeretaapian.

Pada level **Program Prioritas**, Direktorat Jenderal Perkeretaapian berperan sebagai koordinator pencapaian indikator yang mencerminkan peningkatan kinerja layanan transportasi kereta api secara nasional. Indikator tersebut meliputi jumlah perjalanan kereta api, jumlah penumpang angkutan kereta api, serta jumlah penumpang angkutan perkotaan di 10 kota metropolitan. Target indikator-indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan yang konsisten hingga tahun 2029, sejalan dengan upaya penguatan peran perkeretaapian sebagai tulang punggung transportasi massal yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada level **Kegiatan Prioritas**, Direktorat Jenderal Perkeretaapian bertindak sebagai pengampu indikator yang berfokus pada penguatan infrastruktur dan kualitas layanan perkeretaapian. Indikator tersebut mencakup peningkatan panjang jalur kereta api yang beroperasi, peningkatan proporsi jalur kereta api yang menggunakan sistem persinyalan elektrik, serta peningkatan kondisi jalur kereta api yang memenuhi standar *Track Quality Index* (TQI) kategori 1 dan 2. Pencapaian indikator-indikator ini diharapkan dapat

mendukung peningkatan keselamatan, keandalan operasi, serta efisiensi penyelenggaraan perkeretaapian.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian juga mengampu indikator yang berkaitan dengan penyediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel serta efisiensi biaya transportasi logistik angkutan rel terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indikator tersebut mencerminkan kontribusi sektor perkeretaapian dalam mendukung mobilitas perkotaan yang berkelanjutan serta peningkatan daya saing ekonomi nasional melalui penurunan biaya logistik.

Secara keseluruhan, penugasan indikator kinerja kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam RPJMN 2025–2029 menegaskan peran strategis sektor perkeretaapian dalam mendukung sasaran pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan konektivitas, kualitas layanan transportasi, keselamatan, dan efisiensi sistem transportasi nasional. Indikator-indikator tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkeretaapian selama periode Renstra 2025–2029.

2.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional Dalam RPJMN 2025 - 2029

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung arah kebijakan Prioritas Nasional 3, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta industri agromaritim di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Dukungan tersebut diwujudkan melalui :

a. Pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda;
b. Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi;
c. Peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi;
d. Pendalaman sektor keuangan;
e. Pembangunan pariwisata berkelanjutan;
f. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan pemanfaatan teknologi digital diarahkan untuk mendukung prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, termasuk swasembada pangan, air, dan energi, hilirisasi komoditas, serta transformasi digital. Pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,

mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan UMKM dan koperasi.

Pembangunan infrastruktur difokuskan pada optimalisasi aset yang telah terbangun untuk meningkatkan aksesibilitas, menurunkan biaya produksi, transportasi, dan logistik, memperkuat konektivitas serta rantai nilai komoditas, serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Dalam lima tahun ke depan, pembangunan mencakup penyediaan air, perumahan dan permukiman, sanitasi dan persampahan, jaringan transportasi, penyediaan listrik, serta penguatan transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur terpadu, termasuk transportasi, digital, dan ketenagalistrikan, yang didukung pengembangan industri kreatif, diarahkan untuk meningkatkan inovasi, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan kewirausahaan generasi muda, serta memperkuat ekosistem digital. Pendekatan solusi berbasis alam diterapkan untuk mengurangi risiko bencana dan dampak perubahan iklim guna menjamin keberlanjutan pembangunan. Upaya tersebut didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Dalam RPJMN 2025–2029, arah kebijakan pembangunan transportasi difokuskan pada pengembangan konektivitas dan layanan transportasi multimoda untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dasar dan pusat perekonomian serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan :

a. Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan;
b. Pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta api angkutan barang;
c. Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu;
d. Pengembangan jaringan bandara terpadu;
e. Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan;
f. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan;
g. Pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja;
h. Peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.

Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada periode 2025–2029 dilaksanakan secara strategis melalui :

a. Penyediaan layanan kereta api penumpang bersubsidi (perintis dan PSO);
b. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian;
c. Pengembangan layanan kereta api penumpang dan logistik untuk mendukung kawasan strategis dan prioritas;
d. Pengembangan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel di kawasan perkotaan prioritas.

2.1.3 Strategi Pembangunan Nasional

Dalam RPJPN 2025-2045 arah kebijakan pembangunan untuk bidang transportasi merupakan bagian dari Misi ke-6 Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dan ke-7 Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur dalam tataran transformasi sosial difokuskan untuk menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dasar yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai upaya mewujudkan transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dititikberatkan untuk memastikan optimalisasi rantai nilai (value chain) pada sektor produksi komoditas unggulan dan pariwisata yang dimiliki setiap wilayah serta penataan dan pengembangan berbasis logistik cerdas (smart logistics).

Dalam dua puluh tahun mendatang, pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan pendekatan bersih, berkelanjutan, dan berketahanan, serta prinsip tata kelola infrastruktur yang baik dengan penerapan ekonomi sirkular untuk menjaga keseimbangan manfaat dan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJPN 2025-2029 disampaikan pada Tabel 2-2.

Tabel. 2-2 Arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJPN 2025-2029

Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Transportasi	Deskripsi
Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung	a. Pengembangan pelabuhan simpul transhipment sebagai backbone pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik

Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Transportasi	Deskripsi
konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global	b. Pembangunan pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (transshipment hub internasional), terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan seperti Tanjung Priok-Patimban dan Tanjung Perak, serta pelabuhan-pelabuhan pada jalur ALKI seperti Belawan-Kuala Tanjung, Dumai dan Batam (ALKI I), Balikpapan dan Makasar (ALKI II), serta Bitung (ALKI III) c. Pengembangan kawasan ekonomi pada backup area dan hinterland pelabuhan, serta konektivitas hinterland untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah d. Pengembangan infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk meningkatkan efisiensi layanan pelayaran (termasuk ukuran kapal yang lebih besar dan rute hub and spoke) e. Mendorong pemanfaatan teknologi sarana secara terpadu dan lebih efisien, termasuk pemanfaatan kapal LoLo (Lift-On/Lift-Off) untuk angkutan barang jarak jauh, serta mengoptimalkan peran kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) untuk angkutan barang dan penumpang jarak dekat dan menengah f. Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik g. Pengembangan kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaan aset kapal laut dan kapal penyeberangan untuk menjamin keberlanjutan layanan dari aspek teknis dan keselamatan pelayaran h. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pada bandara simpul utama, termasuk pengembangan kapasitas runway dan terminal selaras dengan pertumbuhan permintaan; i. Pengembangan kawasan ekonomi, termasuk aerocity pada hinterland bandara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah melalui keterpaduan infrastruktur bandara dan kawasan ekonomi j. Pengembangan infrastrrrktur serta layanan konektivitas laut dan udara untuk mendukung aksesibilitas di Kawasan Timur Indonesia dan daerah afirmasi 3TP, termasuk melalui pengembangan airstrip, layanan angkutan keperintisan laut dan udara untuk penumpang dan barang, pengembangan teknologi seaplane untuk rnendukung aksesibilitas pada provinsi perairan, sebagai bagian dari konektivitas multimoda dan antarmoda yang terpadu
Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik	a. Pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan dan pengelolaan yang terpadu. Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk

Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Transportasi	Deskripsi
dan mobilitas penumpang	mengkoordinir layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik b. Pengembangan infrastruktur dan jaringan jalan koridor utama dan koridor penghubung, serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi c. Pembangunan infrastruktur dan jaringan jalan di daerah afirmasi 3TP untuk mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal dan menguatkan keterkaitan desa-kota d. Pengembangan konektivitas kereta api pada koridor logisitik untuk angkutan barang dan penumpang e. Penerapan standardisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama f. Pengembangan skema pembiayaan untuk jalan daerah termasuk dana preservasi jalan, DAK tematik, dan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) g. Pengembangan kebijakan tarif dan pengembangan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk pengadaan sarana angkutan
Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi	Penyusunan dan pengembangan rencana transportasi perkotaan di wilayah metropolitan, kota besar dan kota sedang yang terstandar dengan pendekatan Transport Demand Management, termasuk perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah metropolitan Penerapan e-mobility dan pengembangan ekosistem kendaraan berbasis energi baru terbarukan (EBT)

Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045

2.2 Visi, Misi dan Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian

2.2.1 Visi

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029 ditetapkan dengan mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi Ditjen Perkeretaapian sebagaimana diatur dalam Perpres 173 tahun 2024 dan Permenhub PM 4 tahun 2025, serta arah pembangunan nasional dan sektor transportasi perkeretaapian yang mendukung Visi Indonesia Emas 2045, RPJPN 2045, dan Visi Presiden–Wapres 2025–2029. Visi ini juga mengakomodasi arah Kementerian Perhubungan melalui frasa “Transportasi Indonesia Maju” yang menekankan penyelenggaraan jaringan dan layanan transportasi kereta api yang modern, handal, inklusif, berdaya

saing, dan berkelanjutan. Selain itu, visi tersebut diselaraskan dengan RIP Nasional Perkeretaapian 2030 yang memuat visi, misi, tujuan, dan kebijakan pembangunan perkeretaapian hingga 2030, sehingga rumusan visi Ditjen Perkeretaapian 2025–2029 melalui frasa “Perkeretaapian Maju” mencerminkan prinsip berdaya saing, integratif, berkeselamatan, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan pembangunan. Berdasarkan hal tersebut di atas ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029.

“Perkeretaapian Maju Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

2.2.2 Misi

Untuk mencapai Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029 dalam mewujudkan layanan transportasi kereta api yang selamat, aman, nyaman, cepat, dan lancar, disusunlah Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029. Misi ini berperan mendukung terwujudnya Transportasi Maju menuju Indonesia Emas 2029, yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyediakan transportasi perkeretaapian yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan.
2. Mewujudkan dukungan transportasi perkeretaapian terhadap ketahanan dan kemandirian nasional yang berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi perkeretaapian yang merata dan terintegrasi secara kesisteman.
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan kebijakan transportasi perkeretaapian yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan.
5. Memperkuat konektivitas transportasi perkeretaapian nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama.
6. Membangun transportasi perkeretaapian perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau.
7. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian nasional.
8. Mewujudkan transportasi perkeretaapian ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-209 dapat dikategorikan menjadi 2 misi utama yaitu:

1. Mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan perkeretaapian yang maju (merupakan misi eksternal yang terkandung di dalam Misi 1, 2, 3, 5, 6 dan 8 yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam menyelenggarakan jaringan dan layanan transportasi bidang perkeretaapian untuk mewujudkan jaringan dan layanan transportasi nasional yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.
2. Mewujudkan birokrasi dan layanan publik perkeretaapian yang maju (merupakan misi internal yang terkandung di dalam Misi 4 dan 7 yang berkaitan dengan pelaksanaan transformasi tata kelola birokrasi dan layanan publik dalam penyelenggaraan perkeretaapian). Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. (Sumber: UU 59/2024 RPJPN 2025-2045).

2.2.3 Tujuan

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 tidak terlepas dari penurunan/*cascading* tujuan dari Kementerian Perhubungan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan memperhatikan visi yang sudah ditetapkan. Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

T.0 Terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2045-2045.

T.1 Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan.

T.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Penjelasan mengenai Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

a. Tujuan 0 (T.0) merupakan tujuan pada tingkatan *Stakeholders Perspectives* yang mengakomodir perspektif/kepentingan pemangku kepentingan (pengguna, operator, masyarakat dan lainnya) di bidang transportasi perkeretaapian yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung pembangunan nasional yang sesuai arahan Kementerian Perhubungan diwujudkan dalam bentuk dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian terhadap komponen pembangunan yang berkelanjutan, yakni: menurunnya emisi gas rumah kaca sektor transportasi (SPN.2), meningkatnya stok infrastruktur transportasi (SPN.3) dan menurunnya biaya transportasi logistik (SPN.5).
b. Tujuan 1 (T.1) merupakan tujuan pada tingkatan Customer Perspectives yang berkaitan dengan perwujudan visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang berdaya saing, berintegritas, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau, inklusif dan mampu menjawab tantangan perkembangan sesuai visi RPJ Nasional 2030. Indikator tujuan 1 (T.1) yakni: pemenuhan capaian indikator program Infrastruktur konektivitas
c. Tujuan 2 (T.2) merupakan tujuan pada tingkatan Internal Business Perspectives dan Learning and Growth Perspectives yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan perkeretaapian yang berupa keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkualitas, penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Indikator Tujuan 2 (T.2) yakni: Pemenuhan capaian indikator program Dukungan Manajemen.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 hanya akan dimuat pada Tujuan 1 (T.1) dan Tujuan 2 (T.2) karena sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja (Permen PAN RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah), maka kewajiban Kementerian/Lembaga (termasuk unit kerja di bawahnya) hanya sampai *level outcome* (*customer perspectives*) sedangkan T.0 (pada level *stakeholders perspectives*) dimuat dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2020-2025 dan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029.

Tabel. 2-3 Indikator Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Level Perspective	**Tujuan**	**Indikator dan Formulasi Perhitungan**
Stakeholder Perpective	**Tujuan 0 (T.0):** Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029	Kinerja pada level *Stakeholder Perspective* diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)
Customer Perspective	**Tujuan 1 (T.1):** Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	**IKT.1** Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Transportasi Perkeretaapian (%) Tingkat Capaian Kinerja Layanan Transportasi Perkeretaapian (TCLT-KA) = (TCRK-KA + TCIKM-KA + TCOTP-KA + TCTA-KA + TCKES-KA) / 5 Tingkat Capaian Rasio Konektivitas Perkeretaapian (TCRK-KA) = (Realisasi Rasio Konektivitas Perkeretaapian / Target Rasio Konektivitas Perkeretaapian) Tingkat Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik Bidang Perkeretaapian (TCIKM-KA) = (Realisasi IKM terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian / Target IKM terhadap pelayanan publik bidang perkeretaapian) Tingkat Capaian Persentae *On Time Performance* (OTP)

Level Perspective	Tujuan	Indikator dan Formulasi Perhitungan
		Transportasi Perkeretaapian (TCOTP-KA) = (Realisasi OTP transportasi perkeretaapian / Target OTP transportasi perkeretaapian) Tingkat Capaian Persentae Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api (TCTA-KA) = (Realisasi persentase pemenuhan target angkutan kereta api / Target persentase pemenuhan target angkutan kereta) Tingkat Capaian Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian (TCKES-KA) = (Realisasi tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian / Target tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian)
Internal Business Perspectives	**Tujuan 2 (T.2):** Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	**IKT.2** Tingkat Capaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (%) **Tingkat Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (TCTKP-KA) = (Realisasi Kinerja Tata Kelola Pemerintahaan DJKA/ Target Tata Kelola Pemerintahaan DJKA)**

2.2.4 Sasaran Strategis

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan perkeretaapian dalam menyelesaikan isu-isu strategis pada pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian. Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian disusun dengan mempertimbangkan sasaran strategis Kementerian Perhubungan, yang menggambarkan fokus utama dalam penyelesaian isu strategis dan permasalahan perkeretaapian, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta keselamatan dan keamanan transportasi

perkeretaapian. Adapun Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Program 1 (SP.1):** Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian;
2. **Sasaran Program 2 (SP.2):** Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian;
3. **Sasaran Program 3 (SP.3):** Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian;
4. **Sasaran Program 4 (SP.4):** Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Tabel. 2-4 Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Level Perspective	**Tujuan**	**Sasaran Program (SP)**
Stakeholder Perpective	**Tujuan 0 (T.0)** Terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045	a. Prioritas Nasional sesuai RPJMN 2025-2029 b. Sasaran Straegis (SS) Kementrian Perhubungan 2025-2029
Coustemer Perspective	**Tujuan 1 (T.1)** Terwujudnya perkeretaapian yang terhubun, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	a. **Sasaran Program 1 (SP.1)** Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian b. **Sasaran Program 2 (SP.2)** Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian **c. Sasaran Program 3 (SP.3)** Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian
Internal Business Perspectives	**Tujuan 2 (T.2)** Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegras dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	a. **Sasaran Program 4 (SP.4)** Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yan baik di Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Learning and Growth Perspective		

Berikut disampaikan penjelasan masing-masing sasaran sebagai berikut:

1. **Sasaran Program 1 (SP.1), Sasaran Program 2 (SP.2), dan Sasaran Program 3 (SP.3)** merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan konektivitas, pelayanan, dan keselamatan transportasi perkeretaapian. Ketiga sasaran program tersebut merupakan penurunan langsung dari Sasaran Strategis (SS) di tingkat Kementerian Perhubungan dalam rangka mewujudkan perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi, serta mampu memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan secara berkelanjutan (sesuai Tujuan 1/T.1).
2. **Sasaran Program 4 (SP.4)** merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan Internal Business Perspectives dan Learning and Growth Perspectives yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan perkeretaapian. Sasaran ini mencakup keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkualitas, serta penyediaan sumber daya internal yang meliputi pendanaan/anggaran, aset, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, sistem informasi, serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sasaran Program 4 (SP.4) dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (sesuai Tujuan 2/T.2).

Dalam menetapkan peta strategis (strategy map) Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 2029 dilakukan berdasarkan penurunan/cascading dari peta strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.3.

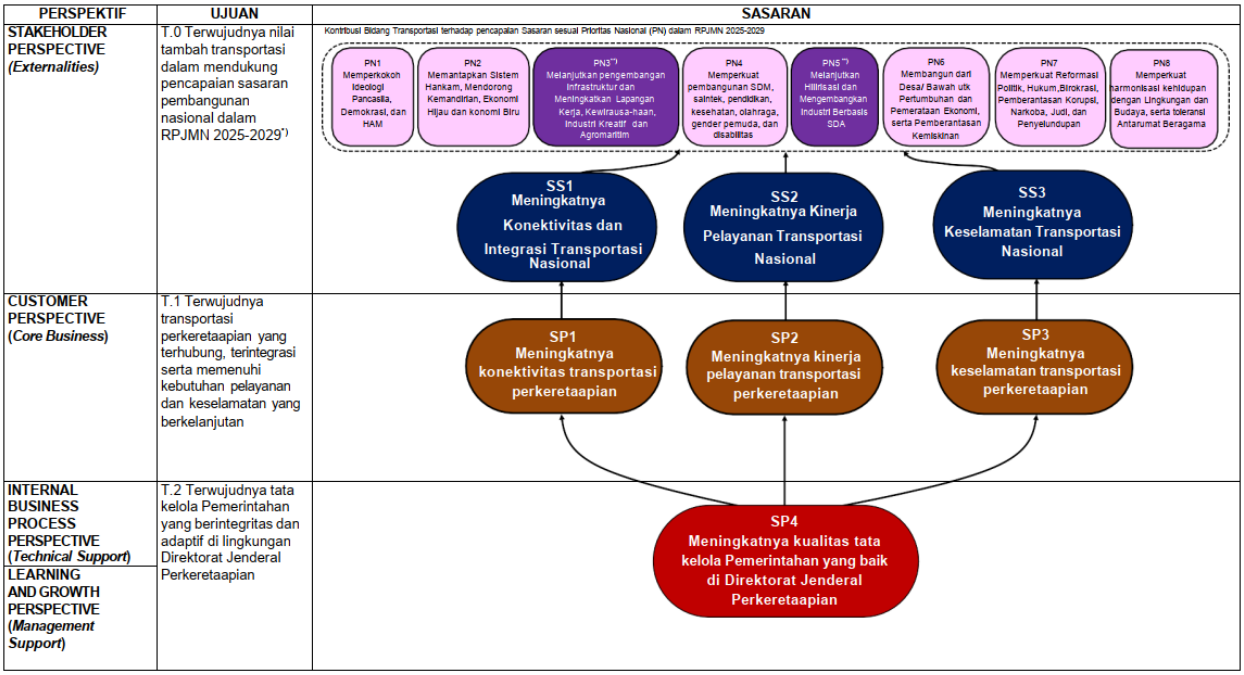

Gambar. 2-1 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029

2.3 Visi, Misi dan Tujuan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

2.3.1 Visi

Penetapan Visi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025-2029 dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. PM No. 36 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian;

b. Arah pembangunan nasional dan transportasi perkeretaapian sesuai muatan pokok Visi Indonesia Emas 2045 yang termuat RPJPN 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029. Untuk itu mengakomodasikan visi Pembangunan Nasional dalam visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa “Menuju Indonesia Maju”;

c. Pengakomodasian visi Kementerian Perhubungan dalam visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa “Transportasi Indonesia Maju”, yang mana sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan jaringan dan layanan transportasi bidang perkeretaapian untuk mewujudkan jaringan dan layanan transportasi nasional yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan;

d. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai unit kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian, tentunya dalam merencanakan pembangunan perkeretaapian berpijak pada dokumen Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Nasional Tahun 2030. Di dalam RIP Nasional tersebut dijelaskan visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan perkeretaapian sampai tahun 2030. Mengakomodasi visi RIP Nasional 2030 dalam visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa “Perkeretaapian Maju” meliputi: berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan”.

Berdasarkan 4 (empat) poin pertimbangan di atas, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang menetapkan visi sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN PERKERETAAPIAN MAJU DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN BARAT DALAM RANGKA MENDUKUNG INDONESIA EMAS 2045”

Penjelasan Visi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Perkeretaapian Maju** menunjukkan tindakan aktif yang ditempuh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dalam menjadikan transportasi perkeretaapian memiliki infrastruktur yang berkualitas dengan pelayanan terbaik demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat;
2. **Wilayah Sumatera Bagian Barat** adalah wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang yang mencakup provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu;
3. **Mendukung Indonesia Emas 2045** menjelaskan bahwa Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang juga menyongsong visi nasional memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia dengan mentransformasi infrastruktur perkeretaapian di wilayah kerjanya.

2.3.2 Misi

Dalam mewujudkan Visi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar disusun Misi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025-2029 dalam mendukung Transportasi Maju di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Menuju Indonesia Emas 2029 ditetapkan Misi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan konektivitas jaringan perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Kelas II Padang;
2. Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
3. Meningkatkan keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
4. Memperkuat kualitas SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan kebijakan transportasi perkeretaapian yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Kelas II Padang;
5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.

Misi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang 2025-2029 dapat dikategorikan menjadi 2 misi utama yaitu:

Misi 1 Mewujudkan peningkatan, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan prasarana perkeretaapian dan pengawasan penyelenggaraan sarana, dan keselamatan perkeretaapia perkeretaapian yang menunjang konektivitas dan layanan perkeretaapian. Misi 1 merupakan misi eksternal berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dalam menyediakan pelayanan transportasi perkeretaapian yang maju yakni: berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan.

Misi 2 Mewujudkan kinerja birokrasi dan layanan publik yang handal. Misi 2 merupakan misi internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang berkaitan dengan perbaikan birokrasi dan layanan publik dalam penyelenggaraan

perkeretaapian yang didukung oleh kualitas kompetensi sumber daya manusia, kelembagaan, regulasi dan penerapan teknologi.

2.3.3 Tujuan dan Sasaran

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang merujuk kepada Tujuan Pembangunan Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Peta Strategi Kementerian Perhubungan 2025-2029, namun tidak termasuk tujuan T.0 yang merupakan tujuan Tingkat Kementerian, sehingga tujuan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang sebagai berikut:

1. Peningkatan Konektivitas Jaringan perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
2. Peningkatan Kinerja Pelayanan transportasi Perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
3. Peningkatan Keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
4. Terselenggaranya pembinaan, pengendalian dan pengawasan perkeretaapian secara akuntable dan transparan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.

Penetapan sasaran kegiatan dalam penyusunan rencana strategis Kementerian/Lembaga memerlukan proses analisis yang komprehensif agar setiap target yang dirumuskan selaras dengan visi, misi, serta tujuan organisasi secara menyeluruh. Melalui analisis yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja.

Dalam proses tersebut dibutuhkan suatu pendekatan analitis yang mampu membantu penentuan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) secara akurat sehingga tingkat keberhasilan masing-masing sasaran dapat diukur secara jelas dan terukur.

Salah satu metode yang dinilai efektif adalah Balanced Scorecard (BSC). Pendekatan ini memberikan gambaran kinerja organisasi secara menyeluruh melalui empat sudut pandang, yaitu aspek keuangan, pelanggan atau pemangku kepentingan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pengembangan organisasi. Melalui BSC, hubungan antar sasaran dapat dipetakan sehingga pencapaian satu target tidak berdampak negatif terhadap target lainnya. Selain itu,

metode ini juga memungkinkan evaluasi kinerja dilakukan secara lebih objektif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penerapan Balanced Scorecard tersebut, sasaran kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025–2029 dirumuskan ke dalam empat perspektif sebagai berikut:

SK.BTP1 Meningkatnya konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (SK BTP1);

SK. BTP 2 Meningkatnya kapasitas prasarana mendukung pelayanan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (SK BTP2);

SK. BTP 3 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (SK BTP3);

SK. BTP 4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (SK BTP4);

SK.BTP 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (SK BTP5);

2.3.4 Arah Kebijakan dan Stategi

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai target kinerja dalam kurun waktu tahun 2025-2029, perlu ditentukan arah kebijakan dan strategi yang akan mendorong upaya pencapaian target kinerja. Arah kebijakan dan strategi Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1) Meningkatnya Konektivitas prasarana perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    a. Melaksanakan pembangunan jalur kereta api baru di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
    b. Melaksanakan reaktivasi serta pembebasan lahan pada jalur kereta api pada lintas non-operasi di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.
2) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;

a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkeselamatan di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.

3) Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   a. Melaksanakan Pengawasan layanan angkutan dan lalu lintas perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Angkutan KA Perintis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   c. Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   d. Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
4) Meningkatkan kapasitas prasarana transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   a. Melaksanakan peningkatan jalur kereta api termasuk Stasiun, Jembatan, Sinyal, Telekomunikasi, rel, wesel dan bantalan di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   b. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan teknis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
5) Mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan melaksanakan kegiatan dukungan manajemen organisasi yang berkontribusi positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :
   a. Melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaporan sesuai kebutuhan organisasi;
   b. Menerapkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan sesuai ketentuan;
   c. Memanfaatkan hasil evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan sebagai bahan perbaikan kinerja selanjutnya;
   d. Memperkuat pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap elemen organisasi;

e. Melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam berbagai bidang yang diperlukan;
f. Melaksanakan layanan administrasi dan operasional perkantoran sesuai kebutuhan;
g. Melaksanakan fungsi kearsipan internal.

2.3.5 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta untuk mendukung kebijakan nasional, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang telah menetapkan 2 (Tujuan) tujuan yang dilengkapi dengan 5 sasaran program. Sasaran program adalah kondisi yang diharapkan secara nyata oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dan merupakan cermin pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari beberapa Kegiatan. Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan capaian, tiap sasaran program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program dan setiap Kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan.

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang telah menetapkan beberapa indikator kinerja beserta targetnya pada tahun 2025-2029. Hal tersebut untuk mengukur pencapaian sasaran program maupun pencapaian kegiatan. Rumusan indikator tersebut tetap memperhatikan arahan dalam RPJMN 2025- 2029. Indikartor Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang ditetapkan berdasarkan cascading Sasaran Program yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagaimana dapat dilihat dalam Lampiran Renstra ini.

Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang menetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan 12 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk periode 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1) Sasaran Meningkatnya KONEKTIVITAS Prasarana Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan indikator kinerja kegiatan:
   a. Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang(Rasio).
2) Sasaran Meningkatnya KAPASITAS Prasarana Mendukung Pelayanan perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan indikator kinerja kegiatan:

a. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI kategori I dan II di wilayah BTP Kelas II Padang(%);

3) Sasaran Meningkatnya KINERJA PELAYANAN Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan indikator kinerja kegiatan:
   a. Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%);
   b. Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%);
   c. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan operasional perjalanan kereta api pada Perlintasan Sebidang (%).
4) Sasaran Meningkatnya KESELAMATAN transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan indikator kinerja kegiatan:
   a. Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang (%);
5) Sasaran Meningkatnya kualitas TATA KELOLA PEMERINTAHAN di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan indikator kinerja kegiatan:
   a. Nilai AKIP BTP Kelas II Padang (Nilai);
   b. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko BTP Kelas II Padang (Nilai);
   c. Nilai Kinerja Anggaran BTP Kelas II Padang (Nilai)
   d. Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di BTP Kelas II Padang (Nilai);
   e. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.

Sesuai dengan struktur sasaran dan indikator kinerja program penyelenggaraan perkeretaapian tahun 2025-2029 yang disampaikan sebelumnya serta untuk mendukung sasaran pembangunan nasional, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai perkembangan lingkungan strategis serta kemampuan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dari hasil evaluasi pelaksanaan Renstra 2020-2024, telah ditetapkan target sasaran program penyelenggaraan perkeretaapian untuk periode Renstra 2025-2029 sebagaimana disampaikan berikut:

Tabel. 2-5 Target Kinerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Transportasi Perkeretaapian yang terhubung Terintegrasi serta Memenuhi Kebutuhan Pelayanan dan Keselamatan yang Berkelanjutan di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	0.50	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39
2		Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	84.40	87.43	87.43	87.50	87.75	88.00
3		Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	114.19	18.56	37.81	57.78	78.5	100
		Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100	-	-	-	-
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	-	10	10	10	10	10

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	BASELINE	TARGET				
				2024	2025	2026	2027	2028	2029
4		Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian Di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100	100	100	100	100
5	Terwujudnya Tata Kelaola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adative di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	79.60	82.50	82.50	82.50	82.50	83.00
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	-	11.5	12	13	14	15
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	35.08	70	83.52	83.52	83.52	83.52
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	%	105.65	100	100	100	100	100
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	-	72.61	73	73.5	74	75

Sumber : Cascading Sasaran Kegiatan dan IKK BTP Kelas II Padang 2025 – 2029 yang telah diolah dengan Baseline Renstra BTP Sumbagbar 2020 - 2024

Tingkat Capaian Kinerja akan tercapai bergantung dari realiasasi dan terlaksananya program kegiatan BTP Kelas II Padang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi termasuk dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan yang tercantum dalam dokumen rencana strategis ini.

2.4 Rencana Kerja (Renja) 2026

Rencana kerja (Renja) 2026 disusun sebagai gambaran arah pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun ke depan, dengan menekankan keterkaitan antara sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja sebagai alat ukur, serta rencana kerja yang akan dilaksanakan.

Tabel. 2-6 Rencana Kerja BTP Kelas II Padang Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA 2026	*Cross Cutting*
Meningkatnya Konektivitas Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	1. Studi Kelayakan (FS) Pembangunan Stasiun Parit Malintang; 2. Penyusunan DED Pembangunan Stasiun Parit Malintang; 3. Monitoring penjagaan aset prasarana perkeretaapian di jalur non aktif oleh Satuan Pelayanan	DJKA, Dit Lalin KA, Dit Prasarana, Pemprov Sumbar, Pemkab / Pemkot, PT KAI, Kemen PU, BPJN Prov Sumbar, BWS Sumatera V, BPK Wil III, Polsek/Polres di Wilayah aset jalur non aktif, BPN Sumbar
Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	1. Penanganan rintang jalan dan peningkatan jembatan KA lintas Lubuk Alung – Kayu Tanam 2. Sertifikasi (Uji Riksa) di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang 3. Pengawasan IMO di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	DJKA, Dit Prasarana, Dit Lalin Ka, Dit Kes KA, Pemkab Padang Pariaman, Pemkot Padang, Pemkot Pariaman, PT KAI, BWS Sumatera V, BPK Wil III

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA 2026	*Cross Cutting*
		4. Perawatan Stasiun di Wilayah BTP Sumbar 5. Pemeliharaan Jalur KA dan Fasilitas Pendukung Keselamatan (Rambu, patok rel, pagar ornamen, dan jalan inspeksi)	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Persentase Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Monitoring dan Pengawasan angkutan Kereta api di PT. KAI Divre II Sumbar	DJKA, Dit Lalin KA, PT KAI
	Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	1. Perawatan JPL dan EWS Padang – Naras; 2. Pengoperasian JPL di Wilayah Sumatera Bagian Barat	DJKA, Dit Pras KA, Dit Kes KA, Pemprov Sumbar, Pemkot / Pemkab, PT KAI
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	1. Identifikasi daerah rawan bencana, termasuk potensi banjir, longsor dan penurunan tanah; 2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan sarana dan prasarana transpotasi perkeretaapian;	DJKA, Ditkes KA, Dit Lalin KA, Dit Pras KA, PT KAI
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	1. Peningkatan penerapan AKIP	DJKA, Biro Ren, Setditjen KA

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA 2026	*Cross Cutting*
Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang		2. Konsistensi pengisian e-performance dalam penilaian kinerja 3. Pendidikan dan Pelatihan SDM BTP Kelas II Padang; 4. Operasioanl Satuan pelayanan	
	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	1. Penyusunan Kegiatan Penerapan Manajemen Resiko (MR) 2. Melakukan identifikasi dan penilaian risiko 3. Melakukan penanganan risiko	ITJEN, DJKA, Biro Ren, Setditjen KA, BPKP
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran; 2. Penyusunan Pagu kebutuhan, Pagu Indikatif, Pagu anggaran, dan Pagu alokasi Anggaran; 3. Meningkatkan konsitensi Rencana Penarikan Dana;	DJKA, Biro Ren, Setditjen KA, Bappenas, Kemenko Infra
	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Monitoring dan evaluasi optimalisasi pemanfaatan PNBP BMN	DJKA, Biro LPPBMN, Setditjen KA,

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENCANA KERJA 2026	*Cross Cutting*
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	1. Peningkatan kualitas tata kelola kearsipan; 2. Reformasi birokrasi; 3. Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan pendidikan pegawai; 4. Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian	ANRI, DJKA, Setditjen KA

BAB III
KONDISI/CAPAIAN PEMBANGUNAN PERKERETAAPIAN

3.1 Evaluasi Pembiayan/Pendanaan Perkeretaapian

Alokasi dan realisasi anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dapat dilihat melalui Evaluasi Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selama tahun 2020-2024.

Tabel. 3-1 Capaian Alokasi dan Realisasi Anggaran selama tahun 2020-2024

Tahun	Klasifikasi Jenis Belanja		Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase
2020	Belanja Pegawai		1.481.952.000	1.448.076.158	97,71%
	Belanja Barang		6.711.187.000	6.469.149.986	96,39%
	Belanja Modal	Rupiah Murni (RM)	164.028.000	162.528.000	99,09%
		SBSN	292.880.922.000	292.874.967.740	100%
	Total		**301.238.089.000**	**300.954.721.884**	**99,91%**
2021	Belanja Pegawai		2.890.257.000	2.777.703.335	96,11%
	Belanja Barang		47.158.789.000	47.133.356.671	99,95%
	Belanja Modal	Rupiah Murni (RM)	171.000.000	169.879.230	99,34%
		SBSN	153.978.520.000	116.309.795.660	75,54%
	Total		**204.198.566.000**	**166.390.743.896**	**81,84%**
2022	Belanja Pegawai		4.081.715.000	4.057.029.287	99,40%
	Belanja Barang		45.975.193.000	45.272.815.814	98,47%
	Belanja Modal	Rupiah Murni (RM)	511.750.000	506.143.920	98,90%
		SBSN	252.643.714.000	252.643.704.694	100%
	Total		**303.212.372.000**	**302.479.693.715**	**99,76%**
2023	Belanja Pegawai		4.952.985.000	4.952.564.272	99,99%
	Belanja Barang		26.864.032.000	26.828.306.137	99,89%
	Belanja Modal	Rupiah Murni (RM)	1.695.000.000	1.692.340.362	99,84%
		PNBP	300,000,000	299.527.000	99,84%
		SBSN	156.974.101.000	156.151.003.767	99,48%
	Total		**190.768.118.000**	**189.912.231538**	**99,55%**
2024	Belanja Pegawai		6.668.858.000	6.647.236.075	99,68%
	Belanja Barang		61.163.932.000	56.428.574.207	92,35%
	Belanja Modal	Rupiah Murni (RM)	72.355.894.000	65.327.054.227	90,29%
		PNBP	500.000.000	0	0%
		SBSN	283.637.054.000	55.084.216.698	19,24%
	Total		**356.429.948.000**	**120.400.938.882**	**33,77%**

Sumber: Renstra BTP Kelas II Padang 2025-2029

Realisasi anggaran BTP Kelas II Padang Tahun 2025 menunjukkan bahwa total pagu anggaran sebesar Rp47.772.011.000 telah terealisasi sebesar Rp36.393.870.989 atau mencapai 76,18%, dengan sisa anggaran sebesar Rp11.378.140.011 (23,81%). Secara rinci, belanja pegawai memiliki pagu Rp8.982.713.000 dengan realisasi Rp8.818.811.242 atau 98,18%, sehingga menyisakan Rp163.901.758 (0,34%). Sementara itu, belanja barang dari pagu Rp38.789.298.000 terealisasi sebesar Rp27.575.059.747 atau 71,09%, dengan sisa anggaran yang cukup besar yaitu Rp11.214.238.253 (23,47%). Adapun untuk belanja modal, termasuk kategori rupiah murni dan SBSN, tidak terdapat alokasi maupun realisasi anggaran pada tahun ini. Secara keseluruhan, capaian realisasi anggaran didominasi oleh belanja pegawai yang hampir terserap optimal, sedangkan belanja barang masih menyisakan porsi anggaran yang cukup signifikan.

Tabel. 3-2 Realisasi Anggaran BTP Kelas II Padang Tahun 2025

No	Jenis Belanja/ Pembiayaan	Pagu (Rp)		Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
		Pagu sesuai PK	Pagu Saat ini	Nilai (Rp)	%	Nilai (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	8.982.713.000	8.982.713.000	8.818.811.242	98,18	163.901.758	0,34
2	Belanja Barang	38.789.298.000	38.789.298.000	27.575.059.747	71,09	**11.214.238.253**	23,47
3	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-
	a. Rupiah Murni	-	-	-	-	-	-
	b. SBSN	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**47.772.011.000**	**47.772.011.000**	**36.393.870.989**	**76,18**	**11.378.140.011**	**23,81**

3.2 Capaian Pembangunan Perkeretaapian

Mendukung Pengembangan perkeretaapian nasional dalam terwujudnya konektivitas, keselamatan, dan pelayanan perkeretaapian secara maksimal kepada masyarakat, berikut capaian besar bidang perkeretaapian periode 2020 - 2024:

1. Pada tahun 2020 – 2021 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan jalur KA antara Padang – Pariaman sepanjang 56 km’sp. Kegiatan peningkatan jalur ini meliputi penggantian rel R.33 menjadi rel R.54 termasuk penggantian bantalan, penambahan balas dan perbaikan aligment jalan. Kegiatan ini bertujaun untuk meningkatkan kualitas jalan rel serta keselamatan perjalanan KA. Selain kegiatan peningkatan jalur juga dilakukan peningkatan jembatan baja sebanyak

2 unit (BH. 24 dan BH. 39) serta jembatan-jembatan kecil dengan bentang di bawah 10 meter menjadi box culvert.

2. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan pembangunan jalur KA spoor simpang menuju Gudang BTP kelas II Padang, peningkatan 4 unit jembatan baja (BH. 52, BH.15, BH.35 dan BH.36 antara Padang – Pariaman.
3. Untuk meningkatkan keselamatan, pada tahun 2022 telah dilaksanakan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), pemasangan Concrete Level Crossing di perlitasan sebidang sebanyak 8 lokasi, pembangunan sistem palang pintu perlintasan sebanyak 27 titik JPL, pembangunan pagar sterilisasi jalan KA dan pembangunan Early Warning System (EWS) di 30 titik perlintasan sebidang pada jalur KA antara Padang – Naras.
4. Pada tahun 2022 dilaksanakan pekerjaan peningkatan Shelter Alai, Air Tawar, Lubuk Buaya, Pasar usang dan reaktivasi Shelter Cimparuh.
5. Untuk mendukung keandalan fasilitas operasi perkeretaapian pada tahun 2022 telah dilaksanakan pekerjaan pembangunan Pembangunan Sistem Radio Traindispatching Tahap II Lintas Padang – Naras.
6. Pada tahun 2022 – 2024 telah dilaksanakan kegiatan peningkatan jalur KA antara Padang – Bukit Putus sepanjang 8 km’sp termasuk peningkatan jembatan sebanyak 6 unit. Pada tahun ini juga dilaksanakan kegiatan pembangunan Stasiun Kampung Jua dan pengembangan fasilitas Stasiun Pauh Lima. Dengan selesainya pembangunan stasiun dan peningkatan jalur ini maka perpanjangan lintas pelayanan KA Pariaman Ekspres yang sebelumnya berakhir di Stasiun Padang dapat dilanjutkan hingga stasiun Pauh Lima.
7. Pada tahun 2022-2024 telah dilaksanakan pembangunan Gudang dan Bangunan Operasional Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang untuk menunjang kegiatan operasional BTP Kelas II Padang.

3.3 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berikut merupakan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) Tahun 2025.

Tabel. 3-3 Capaian Target Kinerja 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SK1. Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	IKK1. Rasio konektivitas wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	0,35	0,33	95,08%
SK2. Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	IKK2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	87,43	87,43	100%
SK3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan KA di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	IKK3. Pemenuhan target angkutan kereta api di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	18,56	18,27	99,43%
	IKK4. Persentase realisasi perjalanan KA Perintis di Wilayah Kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	99,91	99,91%
	IKK5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	10	21,05	210,53%
SK4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi KA di Wilayah Balai Teknik	IKK6. Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik	%	100	100	100%

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Perkeretaapian Kelas II Padang	Perkeretaapian Kelas II Padang				
SK5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	IKK7. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	85,2	80,2	97,21%
	IKK8. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	11,5	11,5	100%
	IKK9. Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	70	83,52	119,31%
	IKK10. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100	100%
	IKK11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	73	72,61	99,46%

3.4 Capaian Output Unit Kerja

Berikut merupakan capaian Output Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025.

Tabel. 3-4 Capaian Output Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025

KODE	RO	Satuan	Target RO (TVRO)	Realisasi RO (RVRO)	CRO (Capaian RO)	Alokasi Anggaran RO (AARO)	Realisasi Anggaran RO (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO) - RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) / (4)	(7)	(8)	(9) = (7) x (6)	(10) = (9) - (8)
GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**								
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian								
CBA.008	Infrastruktur Perkeretaapian	Km	1	1	100%	283.452.000	73.402.620	283.452.000	210.049.380
QAH.004	Penyelenggaraan Layanan KA Perintis	Layanan	3	3	100%	12.168.740.000	11.764.775.000	12.168.740.000	403.965.000
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian								
CDA.001	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Paket	8,5	9	100%	1.808.603.000	1.093.358.936	1.808.603.000	715.244.064
CDA.002	Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Paket	127	127	100%	418.162.000	372.225.525	418.162.000	45.936.475
CDA.003	Operasi Prasarana Perkeretaapian	Paket	1	1	100%	7.770.260.000	5.284.827.671	7.770.260.000	2.485.432.329
RDA.001	Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian (IMO)	Paket	1	1	100%	8.728.187.000	3.581.049.000	8.728.187.000	5.147.138.000
WA	**Dukungan Manajemen**								
4600	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian								
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100%	245.217.000	243.100.785	245.217.000	2.116.215
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Perkeretaapian								
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dokumen	1	1	100%	536.842.000	533.161.949	536.842.000	3.680.051
EBA.994	Layanan Perkantoran	Dokumen	1	1	100%	12.318.622.000	12.041.015.428	12.318.622.000	277.606.572
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	1	1	100%	104.768.000	99.621.378	104.768.000	5.146.622
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen	1	1	100%	966.719.000	815.764.340	966.719.000	150.954.660
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	Dokumen	1	1	100%	423.457.000	394.155.551	423.457.000	29.301.449
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	Dokumen	1	1	100%	9.632.000	80.148.121	9.632.000	- 70.516.121
Jumlah						**45.782.661.000**	**36.376.606.304**	**45.782.661.000**	**9.406.054.696**

Efisiensi RO Satker

$$= \frac{\text{(Alokasi anggaran*Capaian RO)-Realisasi Anggaran RO)}}{\text{Jumlah total anggaran RO}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{(AAROxCRO)-RARO)}}{\text{AARO}} \times 100\%$$

$$= \mathbf{20,55\%}$$

BAB IV
RENCANA KINERJA TAHUNAN

4.1 Isu-isu Stategis Pembangunan Perkeretaapian

1. Penanganan rinja (rintang jalan)

Jalur Kereta Api Lintas Lubuk Alung – Kayu Tanam merupakan lintas aktif yang dilewati oleh kereta api Lembah Anai, kondisi Prasarana pada lintas tersebut sering mengalami permasalahan diantaranya terdapat daerah rawan longsor dan sering terjadi banjir apablia curah hujan tinggi, sehingga mengakibatkan terganggunya perjalanan kereta api dan tidak terjaminnya keselamatan perjalanan KA. Selain itu dengan mengacu pada riwayat kondisi prasarana yang ada, telah terjadi peristiwa banjir dan gogosan di jalur kereta api lintas tersebut pada tahun 2022 s.d 2025 yang saat ini baru ditindaklanjuti hanya dengan penanganan sementara. Guna menjamin tersedianya prasarana perkeretaapian yang layak dan handal maka perlu dilakukan perbaikan/ penanganan secara permanen.

2. Peningkatan keselamatan

Keselamatan merupakan prioritas dalam penyelenggaraan perkeretaapian. Akan tetapi saat ini masih sering terjadi kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang. Berdasarkan data dari tahun 2020 – 2024, kejadian kecelakaan terbanyak yang terjadi di Sumatera Barat adalah kejadian temper antar KA dengan kendaraan roda 4 atau 2, hal ini berkaitan dengan kondisi perlintasan sebidang yang ada di Sumatera Barat yang kerap di bangun tanpa izin.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penutupan pada perlintasan liar. Tetapi tidak semua perlintasan sebidang dapat ditutup dikarenakan perlintasan tersebut berada pada jalur evakuasi bencana ataupun mejadi akses utama masyarakat menuju jalan raya. Oleh karena itu juga perlu dilakukan sterilisasi jalur KA di daerah rawan kecelakaan. Serta perlu adanya penambahan palang pintu pada perlintasan sebidang resmi yang tidak berpintu serta pembangunan Concrate Level Crossing (CLC) pada perlintasan sebidang sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat menurun.

3. Perpanjangan lintas pelayanan

Kota Padang merupakan tujuan utama sebagian besar perjalanan dari Kayutanam dan Sicincin dengan potensi sebanyak 1.042 penumpang per hari. Saat

ini belum ada KA yang melayani Stasiun Kayutanam menuju Stasiun Padang, sehingga penumpang KA Lembah Anai dari Stasiun Kayutanam yang akan menuju Stasiun Padang harus transit di Stasiun Duku dan berpindah KA lain menuju Stasiun Padang. Dikarenakan tingginya permintaan masyarakat, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang mengusulkan rerouting lintas pelayanan KA Lembah Anai yang semula melayani rute Kayu Tanam – Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dan melayani 6 stasiun (Kayu Tanam, Sicincin, Lubuk Alung, Pasar Usang, Duku, dan BIM) menjadi rute Kayu Tanam – Padang dengan melayani 10 stasiun (Kayu Tanam, Sicincin, Lubuk Alung, Pasar Usang, Duku, Lubuk Buaya, Tabing, Air Tawar, Alai, dan Padang).

4. Pengawasan aset non aktif

Maraknya pencurian aset perkeretaapian pada jalur non aktif juga merupakan permasalahan yang belum dapat teratasi sampai saat ini. BTP Kelas II Padang melalui Satuan Pelayanan telah memaksimalkan pengawasan, hanya saja keterbatasan anggaran dan personil yang mampu untuk melakukan penjagaan merupakan salah satu faktor kunci permasalahan tersebut.

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Perkeretaapian

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai target kinerja dalam kurun waktu tahun 2025-2029, perlu ditentukan arah kebijakan dan strategi yang akan mendorong upaya pencapaian target kinerja. Arah kebijakan dan strategi Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Barat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1) Meningkatnya Konektivitas prasarana perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   a. Melaksanakan pembangunan jalur kereta api baru di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   b. Melaksanakan reaktivasi serta pembebasan lahan pada jalur kereta api pada lintas non-operasi di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.
2) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;

a. Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkeselamatan di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang.

3) Meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi kereta api di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   a. Melaksanakan Pengawasan layanan angkutan dan lalu lintas perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   b. Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan sarana perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   c. Melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
4) Meningkatkan kapasitas prasarana transportasi kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   a. Melaksanakan peningkatan jalur kereta api termasuk Stasiun, Jembatan, Sinyal, Telekomunikasi, rel, wesel dan bantalan di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
   b. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dan pengawasan teknis di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
5) Mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dengan melaksanakan kegiatan dukungan manajemen organisasi yang berkontribusi positif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut yaitu :
   a. Melaksanakan fungsi perencanaan dan pelaporan sesuai kebutuhan organisasi;
   b. Menerapkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan sesuai ketentuan;
   c. Memanfaatkan hasil evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan sebagai bahan perbaikan kinerja selanjutnya;
   d. Memperkuat pengendalian internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap elemen organisasi;
   e. Melaksanakan fungsi pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam berbagai bidang yang diperlukan;

f. Melaksanakan layanan administrasi dan operasional perkantoran sesuai kebutuhan;
g. Melaksanakan fungsi kearsipan internal.

4.3 Program Prioritas Pembangunan Perkeretaapian

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Strategis Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Nomor : KP.105/SK.150/BTP-PDG/2025 tentang Rencana Strategis Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun. Berikut Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 :

Tabel. 4-1 Program dan Kegiatan 2026

Program	Kegiatan
Program Infrastruktur Konektivitas	1. Penanganan Rintang Jalan KA antara Lubuk Alung – Kayu Tanam; 2. Pemeliharaan, Perawatan, dan Pengoperasian Infrastruktur Perkeretaapian (IMO); 3. Pemeliharaan Stasiun; 4. Pengoperasian JPL; 5. Pemeliharaan JPL dan EWS 6. Pengadaan Peralatan Kerja berupa Forklift kapasitas 10 ton.
Program Dukungan Manajemen	1. Pengawasan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian; 2. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran.

4.4 Target Indikator Kinerja Kegiatan

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis dalam menginventarisir, menganalisis dan menggunakan data/informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi Pemerintah dalam melaksanakan program-program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, pengukuran kinerja juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran serta mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja. Indikator kinerja menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi

Pemerintah dengan tujuan agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur. Indikator Kinerja tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Indikator tersebut merupakan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Dalam mengukur Kinerja, diperlukan formulasi perhitungan pada setiap Indikator Kinerja. Formulasi tersebut dimuat dalam Keputusan Dirjen KA dimaksud. Berikut Formulasi perhitungan Manual Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang :

Tabel. 4-2 Formulasi Perhitungan Manual Indikator Kinerja Kegiatan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
IKK1.1. Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian di wilayah BTP s.d Tahun Berjalan dibandingkan dengan Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang Terhubung dengan infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS Tahun 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian di wilayah BTP. Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian (RK_{tp}) = *Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur KA di wilayah BTP s.d Tahun Berjalan* / *Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur KA di wilayah BTP sesuai RIPNAS Tahun 2030* x *Faktor Pemanfaatan Infrastruktur KA di wilayah BTP*
IKK2.1. Kondisi Jalur KA sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian (%) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	Panjang jalur kereta api yang telah diukur menggunakan kereta ukur di wilayah BTP dengan hasil Kategori 1 dan 2 (kecepatan > 80 km/jam) per periode dibandingkan dengan panjang jalur KA terukur di wilayah BTP pada periode tersebut. ***Kondisi Jalur KA yang Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2 di wilayah BTP*** = *Panjang Jalur KA yang Telah Diukur di Wilayah BTP dengan Hasil TQI Kategori I dan II pada Tahun Berjalan* / *Total Panjang Jalur KA Terukur di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan* X 100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
IKK3.1. Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	Penjumlahan antara pemenuhan target angkutan kereta api penumpang dan pemenuhan target angkutan kereta api barang di wilayah BTP Padang periode 2020 – 2024 sesuai dokumen Rencana Strategis dengan bobot masing-masing 50%. ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA di Wilayah BTP*** = Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Penumpang di Wilayah BTP + Persentase Pemenuhan Target Angkutan KA Barang di Wilayah BTP Pemenuhan target angkutan penumpang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan penumpang kereta api pada Tahun 2025 s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan penumpang kereta api s.d Tahun 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis Ditjen ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Penumpang di Wilayah BTP*** = (Jumlah Realisasi Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BTP dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan / Target Angkutan Penumpang Kereta Api di Wilayah BTP s.d Tahun 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian) x 50% Pemenuhan target angkutan barang diperoleh dari jumlah realisasi angkutan barang kereta api pada Tahun 2025 s.d Tahun berjalan dibandingkan dengan target angkutan barang kereta api s.d 2029 sesuai dokumen Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian. ***Persentase Pemenuhan Target Angkutan Barang di Wilayah BTP*** = (Jumlah Realisasi Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah BTP dari Tahun 2025 s.d Tahun Berjalan / Target Angkutan Barang Kereta Api di Wilayah BTP s.d Tahun 2029 sesuai Dokumen Rencana Strategis Ditjen Perkeretaapian) x 50%
IKK3.3. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	Persentase penurunan kejadian gangguan operasional perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang diperoleh dengan menggunakan baseline jumlah gangguan operasional perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang rata-rata tahun periode sebelumnya (2020-2024) yang ditargetkan penurunannya secara berkala selama periode Tahun 2025-2029. ***Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang*** = (*Baseline* Rata-Rata *Jumlah kejadian gangguan operasional pada* periode sebelumnya (2020-2024) - *Jumlah kejadian gangguan pada tahun berjalan*) / *Baseline* Rata-Rata *jumlah kejadian gangguan operasional pada* periode sebelumnya (2020-2024) x 100%

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
IKK4.1. Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diperoleh dari selisih nilai maksimal tingkat keselamatan (100%) dengan persentase jumlah kejadian kecelakaan kereta api (anjlokan, terguling, tabrakan KA dengan KA dan lain-lain/terbakar) di wilayah BTP pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di wilayah BTP pada tahun berjalan. $\textit{Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah BTP} = \left[1 - \frac{\text{Jumlah Kejadian Kecelakaan KA di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan} \times 1.000}{\text{Jumlah Keberangkatan Kereta Api di Wilayah BTP pada Tahun Berjalan}}\right] \times 100\%$
IKK5.1. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal/Tim Evaluasi Internal Eselon I mengacu KM 74 Tahun 2024. $\textit{Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian} = \textit{(Nilai Perencanaan x 30\%) + (Nilai Pengukuran x 30\%) + (Nilai Pelaporan x15\%) + (Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal x 25\%)}$
IKK5.2. Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1-30) mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di lingkungan Kementerian Perhubungan. Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15 $\sum Total\ per\ Parameter = \frac{Jumlah\ hasil\ pengukuran}{Jumlah\ Teknik\ pengumpulan\ data}$ Keterangan : P = Parameter penilaian tingkat manajemen resiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2 Total Skor MR / Level / Kondisi MR 0 – 7 / Initial / Belum ada MR Formal 8 – 14 / Repeatable / Parsial (Scattered Silo), Belum memadai 15 – 20 / Defined / Strategi dan kebijakan MR telah dikomunikasikan, Implementasi MR kurang integratif 21 – 25 / Managed / MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi 26 – 30 / Optimized / Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian Internal, dan Tata Kelola dengan baik
IKK5.3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Teknik Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: • Lebih dari 90 : Kategori Sangat Baik; • 80 - 90 : Kategori Baik; • 60 - 80 : Kategori Cukup; • 50 - 60 : Kategori Kurang;

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
		• Kurang dari 50 : Kategori Sangat Kurang. NKA= (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)
IKK5.4. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yakni Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK) dan penilaian dilakukan pada 2 aspek penilaian dengan bobot pada masing-masing unit sebagai berikut: • Unit Pengolah (UP) o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 70%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 30%) • Unit Kearsipan (UK) o Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 60%) o Aspek Sumber Daya Kearsipan (bobot 40%) $$\text{Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Setditjen Perkeretaapian} = \frac{\text{Nilai Unit Pengolah Kearsipan} + \text{Nilai Unit Kearsipan}}{2} \text{ X } 100\%$$ Adapun kategorisasi nilai hasil pengawasan kearsipan sebagai berikut: • > 90 – 100 : kategori AA (sangat memuaskan); • > 80 – 90 : kategori A (memuaskan); • > 70 – 80 : kategori BB (sangat baik); • > 60 – 70 : kategori B (baik); • > 50 – 60 : kategori CC (cukup); • > 30 – 50 : kategori C (kurang); • 0 – 30 : kategori D (sangat kurang).
IKK5.5. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai	%	Realisasi perolehan PNBP Balai Teknik Perkeretaapian dibandingkan dengan target PNBP pada tahun berjalan. $$\text{\% Realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian} = \frac{\text{Realisasi PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada tahun berjalan}}{\text{Target PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TATA CARA PERHITUNGAN
Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang		

Target Kinerja tahun 2026 BTP Kelas II Padang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dengan dilakukannya reviu Indikator Kinerja Kegiatan, maka dilakukan penyesuaian terhadap target pada Rencana Strategis. Adapun perubahan signifikan dalam indikator kinerja kegiatan Tahun 2026 adalah penghapusan IKK Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang. Hal ini sehubungan dengan berubahnya skema pembiayaan KA Lembah Anai dari subsidi perintis menjadi PSO di TA 2026. Sehingga Target Kinerja Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4-3 Target Kinerja Tahun 2025 - 2026

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
				2025	2026
1	SK1. Meningkatnya Konektivitas Prasarana di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	IKK1. Rasio konektivitas wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	0.35	0.36
2	SK2. Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	IKK2. Persentase pengoperasian jalur KA yang sesuai dengan TQI Kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	87.43	87.45
3	SK3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	IKK3. Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	18.56	37.81
		IKK4. Persentase realisasi perjalanan kereta api perintis di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	-
		IKK5. Persentase Penurunan Kejadian Gangguan operasional perjalanan kereta api pada Perlintasan Sebidang	%	10	10
4	SK4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	IKK6. Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100
5	SK5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	IKK7. Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian	Nilai	82.5	82.5
		IKK8. Tingkat Penerapan Managemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	11.50	12

		IKK9. Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	70	83.52
		IKK10. Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100
		IKK10. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	72.61	73

Sumber : Rencana Strategis BTP Kelas II Padang Tahun 2025 – 2029

4.5 Rencana Kinerja

Perjanjian Kinerja tahun 2026 disusun berdasarkan capaian tahun 2025, rencana kinerja tahun 2026, dan proyeksi target yang akan dilaksanakan. Berikut target kinerja tahun 2025 Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang :

SK1. Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

IKK1.1 Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Pengukuran kinerja berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KP-DJKA 162 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian merupakan perbandingan antara jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian di wilayah BTP s.d Tahun Berjalan dibandingkan dengan Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung infrastruktur perkeretaapian sesuai RIPNAS tahun 2030 dikalikan dengan faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian di wilayah BTP.

Tata Cara Perhitungan:

$$\text{Rasio Konektivitas Infrastruktur Perkeretaapian } (RK_{pk}) = \frac{\text{Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis lainnya yang terhubung Infrastruktur KA di wilayah BTP s.d Tahun Berjalan}}{\text{Rencana Jumlah PKN/PKW/Simpul Transportasi (Bandara, Pelabuhan, Terminal Tipe A)/ Kawasan Strategis Nasional/Kawasan Strategis Lainnya yang Terhubung dengan Infrastruktur KA di wilayah BTP sesuai RIPNAS Tahun 2030}} \times \text{Faktor Pemanfaatan Infrastruktur KA di wilayah BTP}$$

Keterangan :

Faktor pemanfaatan infrastruktur perkeretaapian merupakan perbandingan realisasi perjalanan kereta api baik penumpar maupun barang terhadap program perjalanan kereta api yang ditetapkan pada Grafik Perjalanan Kereta Api di wilayah BTP

Pada wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang terdapat 8 kawasan PKN/PKW/KSN/Simpul Transportasi. Dari 8 kawasan tersebut, 4 kawasan telah terhubung, yaitu PKN Perkotaan Padang - Lubuk Alung, PKW Pariaman, serta Simpul Transportasi Bandara BIM dan Pelabuhan Teluk Bayur. Sedangkan kawasan yang belum terhubung yaitu PKW Solok, Bukittinggi, Payakumbuh, dan Sawahlunto.

Berikut tabel konektivitas prasarana perkeretaapain wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang :

Tabel. 4-4 Wilayah Terkoneksi Transportasi Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

No.	PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional	Status	
		Terhubung	Belum Terhubung
PKN/PKW/Simpul Transportasi/Kawasan Strategis Nasional			
1	Perkotaan Padang – Lubuk Alung	ü	
2	Pariaman	ü	
3	Solok	-	ü
4	Bukittinggi	-	ü
5	Payakumbuh	-	ü
6	Sawahlunto	-	ü
Simpul Transportasi			
1	Pelabuhan Teluk Bayur	ü	-
2	Bandara Internasional Minangkabau	ü	-

Sumber: Renstra 2025 – 2029 BTP Padang.

Tabel. 4-5 Target Indikator Kinerja Rasio Konektivitas

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Rasio Konektivitas Transportasi Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	0,33	0,36	0,36	PKN/PKW/KSN/Simpul Transportasi yang telah terhubung yaitu Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk Alung-Pariaman, Kota Pariaman, Pel. Teluk Bayur, dan Bandara BIM. Target kinerja telah memenuhi unsur kriteria SMART

SK2. Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

IKK2.1 Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2

Track Quality Index (TQI) merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas kondisi jalur kereta api berdasarkan kesesuaian geometrik jalur terhadap standar teknis yang ditetapkan. Indeks ini menjadi indikator penting dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, serta keandalan operasional perjalanan kereta api. Kondisi

jalur dinyatakan memenuhi standar apabila hasil pengukuran menunjukkan TQI Kategori 1 dan 2, yang diperoleh melalui pengukuran menggunakan kereta ukur secara periodik dan terukur.

Formulasi Pengukuran Jalur KA sesuai standar TQI kategori 1 dan 2 dinyatakan dalam bentuk persentase yang dihitung dari panjang jalur yang memenuhi kategori 1 dan 2 terhadap total panjang jalur kereta api terukur pada periode berjalan.

Pengukuran nilai TQI Periode ke - IV Tahun 2025 memiliki capaian sebesar 87,43% yang menjadi pertimbangan penetapan target kinerja tahun 2026. **Target kinerja Indikator Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2** pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tetap sebesar 87,34%. Berikut hasil pengukuran TQI Periode Pengukuran ke – IV Tahun 2025 di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang :

Tabel. 4-6 Nilai Track Quality Index Periode Pengukuran ke – IV Tahun 2025

Klasifikasi TQI	Kualifikasi				Panjang Jalur	Jalur Terukur Periode IV Tahun 2025		
					Km'sp	Km'sp		%
TQI A (Kecepatan 80 s.d 120 km/jam)	Kategori 1	Kecepatan	:	100 s.d 120 km/jam	108,227	94,264	16,323	15,08
		Kondisi	:	Nyaman				
	Kategori 2	Kecepatan	:	80 s.d 100 km/jam			78,301	72,35
		Kondisi	:	Aman				
TQI B (Kecepatan 40 s.d 80 km/jam)	Kategori 3	Kecepatan	:	60 s.d 80 km/jam		13,603	11,905	11,00
		Kondisi	:	Waspada				
	Kategori 4	Kecepatan	:	40 s.d 60 km/jam			1.698	1,57
		Kondisi	:	Bahaya				

Sumber: PT KAI (Persero) Divre 2 Sumbar

Tabel. 4-7 Target Indikator Kinerja TQI

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Kondisi Jalur KA Sesuai Standar TQI Kategori 1 dan 2	%	87,43	87,34	87,34	Pengukuran Periode IV Tahun 2025 sebesar 87,43%. Setelah diteliti lebih lanjut hasil final pengukuran sebesar 87,34% yang kemudian ditetapkan menjadi target kinerja.

SK3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

IKK3.1 Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;

Penyelenggaraan perkeretaapian pada wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang meliputi angkutan penumpang dan angkutan barang. Angkutan penumpang yang beroperasi saat ini terdiri dari KA Lembah Anai dengan lintas pelayanan Kayu Tanam – Padang, KA Minangkabau Ekspres dengan lintas pelayanan Pulau Aie – BIM, dan KA Pariaman Ekspres dengan lintas pelayanan Pauh Lima – Naras. Sementara angkutan barang hingga saat ini hanya melakukan angkutan semen dan klinker dengan lintas pelayanan Indarung – Bukit Putus.

Target Angkutan KA penumpang tahun 2026 sebanyak 2.013.346 **penumpang**. Berdasarkan pembobotan nilai pemenuhan angkutan penumpang (50%), **target pemenuhan angkutan KA penumpang tahun 2026 sebesar 18,69%** terhadap target Renstra tahun 2026.

Angkutan KA Barang tahun 2026 ditargetkan sebesar **1.635.789 ton**, berdasarkan pembobotan nilai pemenuhan angkutan barang (50%), **target pemenuan angkutan KA barang tahun 2026 sebesar 19,12%** dari target Renstra tahun 2026.

Berdasarkan data diatas, **pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknk Perkeretaapian Kelas II Padang tahun 2026 ditetapkan sebesar 37,81%.**

Tabel 4.1
Target Kinerja Pemenuhan Target Angkutan KA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Persentase Pemenuhan target angkutan kereta api di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	18,27	37,81	37,81	Target angkutan penumpang sebesar 2.013.346 orang. Target diatas realisasi tahun 2025 sebesar 1.977.373 orang. Target angkutan barang sebesar 1.635.789 ton. Target diatas realisasi tahun 2025 sebesar 1.498.475 ton.

IKK3.2 Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang

Dalam rangka memenuhi amanat untuk penyelenggaraan transportasi yang aman, nyaman dan selamat, peningkatan keselamatan pada perlintasan seidang menjadi prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Persinggungan dan perpotongan prasarana perkeretaapian dengan utilitas maupun fasilitas umum perlu menjadi perhatian lebih.

Berkaitan hal dimaksud, perlu dilakukan pengukuran kinerja penanurunan kejadian gangguan operasional pada perlintasan sebidang melalui indikator Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang.

Dasar perhitungan kinerja dihitung menggunakan baseline jumlah gangguan operasional perjalanan kereta api pada perlintasan sebidang tahun 2024, yang penurunannya ditargetkan secara bertahap selama periode tahun 2025 hingga 2029. Gangguan operasional yang dimaksud mencakup kejadian-kejadian yang menyebabkan keterlambatan, penghentian, atau terganggunya kelancaran perjalanan kereta api akibat kondisi di perlintasan sebidang, baik yang disebabkan oleh kerusakan sarana perlintasan, pelanggaran pengguna jalan, maupun gangguan teknis lainnya.

Baseline kejadian gangguan operasional pada perlintasan sebidang pada Renstra 2025 – 2029 sebanyak 23 kejadian. Tahun 2026 ditargetkan penurunan kejadian sebesar 22%.

Tabel. 4-8 Target Indikator Kinerja Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Persentase Penurunan Kejadian Gangguan Operasional Perjalanan Kereta Api pada Perlintasan Sebidang	%	21,05	10	22	Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 21,05% menjadi dasar pertimbangan penetapan target yang memenuhi unsur SMART. Target penurunan kejadian gangguan operasional sebesar 22%.

SK 4. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

IKK4.1 Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Agar penyelenggaraan Angkutan KA berjalan dengan baik dan tidak terjadi kecelakaan antar kereta api, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang melaksanakan tugas dan fungsi berupa pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan keselamatan lalu lintas dan angkutan kereta api, pemantauan dan pengawasan sarana, serta pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan/kelaikan prasarana.

Jenis kecelakaan yang termasuk kedalam kecelakaan kereta api yaitu tabrakan KA dengan KA, anjlokan, terguling, dan terbakar. Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian diukur menggunakan jumlah kejadian kecelakaan kereta api (tabrakan KA

dengan KA, anjlokan, terguling, terbakar) di wilayah BTP Padang pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah keberangkatan kereta api di wilayah BTP Padang pada tahun berjalan. Tahun 2026 **ditargetkan tidak terjadi kecelakaan di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang sehingga target capaian sebesar 100%.**

Tabel. 4-9 Target Indikator Kinerja Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Tingkat keselamatan transportasi perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100	100	Tidak terjadi kecelakaan Kereta Api (tabrakan KA dengan KA, anjlokan, terguling, terbakar) .

SK 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Dalam rangka menunjang pelaksanaan program Infrastruktur Konektivitas Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang juga melaksanakan fungsi sekretariat untuk menunjang tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang. Kegiatan lainnya tersebut sebagai berikut:

1) Penyusunan perencanaan;
2) Pelaksanaan urusan keuangan;
3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
4) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
5) Pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
6) Pelaksanaan urusan hukum;
7) Pelaksanaan urusan organisasi;
8) Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara;
9) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
10) Pelaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan.

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang untuk mencapai sasaran tersebut, sebagai berikut **:**

IKK5.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Pelaksanaan akuntabilitas merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan. Sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, penguatan akuntabilitas memiliki peranan penting.

Sehingga penilaian terhadap penyelenggaraan SAKIP menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Agar semakin meningkatkan komitmen pimpinan dan meningkatkan kesadaran seluruh pegawai, maka nilai AKIP ditetapkan menjadi indikator kinerja. Target kinerja Nilai AKIP ditetapkan dalam rangka penjaminan akutabilitas atas kinerja yang dilakukan oleh instansi.

Nilai AKIP mencerminkan tingkat konsistensi perencanaan, kualitas pengukuran kinerja, ketepatan pelaporan, serta efektivitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Melalui indikator ini dapat dilihat sejauh mana tata kelola kinerja organisasi telah berjalan secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas publik.

Perhitungan Nilai AKIP dilakukan dengan pendekatan komposit berbobot yang merepresentasikan seluruh siklus manajemen kinerja. Nilai akhir diperoleh dari akumulasi empat komponen utama, yaitu perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%). Masing-masing komponen memiliki kontribusi berbeda sesuai tingkat pengaruhnya terhadap kualitas penerapan SAKIP di lingkungan satuan kerja.

Bobot terbesar pada aspek perencanaan dan pengukuran kinerja menunjukkan bahwa kualitas perumusan target, indikator, serta konsistensi pemantauan capaian menjadi fondasi utama dalam sistem akuntabilitas kinerja. Sementara itu, aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal memiliki bobot signifikan karena berperan memastikan adanya proses penilaian, umpan balik, dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kinerja. Adapun pelaporan kinerja, meskipun berbobot lebih kecil, tetap menjadi elemen penting karena mencerminkan transparansi dan pertanggungjawaban atas hasil yang dicapai.

Dengan metode pembobotan ini, nilai AKIP tidak hanya menggambarkan hasil akhir kinerja, tetapi juga menilai kualitas proses pengelolaan kinerja secara menyeluruh. Pendekatan tersebut memastikan bahwa peningkatan nilai AKIP harus diikuti dengan perbaikan yang seimbang pada tahap perencanaan, pelaksanaan pengukuran, pelaporan, serta evaluasi internal.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Evaluator Internal Direktorat Jenderal Perkeretaapian, penyelenggaraan SAKIP Balai Teknik Perkeretaapian Padang Tahun 2025 mendapat nilai 80,2 dengan kategori A (Memuaskan). Mempertimbangkan capaian tahun 2025 sehingga **Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 82,5**.

Tabel. 4-10 Target Indikator Nilai AKIP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	80,2	82,5	82,5	Target kinerja sama dengan target pada Renstra 2025 – 2029.

IKK5.2 Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, akuntabilitas kinerja perlu dilaksanakan serta pengelolaan dan mitigasi atas risiko juga perlu diantisipasi. Pengelolaan risiko sebagai bagian dari Manajemen Risiko atur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 Tentang Manajemen risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Pengelolaan Manajemen risiko di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Unit Manajemen Risiko (UMR). Dengan adanya sistem informasi ini, diharapkan seluruh informasi terkait dengan risiko dan keluaran (output) setiap proses manajemen risiko di BTP Kelas II Padang dapat terdokumentasikan secara konsisten dan aman.

Penilaian Tingkat Manajemen Risiko (Nilai 1 – 30) mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Total Skor MR = Total P1 + Total P2 + Total P3 + Total P4 + Total P5 + Total P6 + Total P7 + Total P8 + Total P9 + Total P10 + Total P11 + Total P12 + Total P13 + Total P14 + Total P15

$$\sum Total\ per\ Parameter = \frac{\text{Jumlah Hasil Pengukuran}}{\text{Jumlah Teknik Pengumpulan Data}}$$

Keterangan :

P = Parameter Penilaian Tingkat Manajemen Risiko, dimana setiap penilaian parameter terdiri dari nilai 0, 1 dan 2

Tabel. 4-11 Level Penilaian Tingkat Manajemen Risiko

Total Skor MR	Level	Kondisi MR
0 – 7	Initial	Belum ada MR Formal
8 – 14	Repeatable	Parsial (Scatered Silo), Belum Memadai
15 – 20	Defined	Strategi dan Kebijakan MR telah dikomunikasikan, implementasi MR kurang integrative
21 – 25	Managed	MR telah dikomunikasikan dan diimplementasikan, namun masih ada kelemahan dalam implementasi
26 - 30	Optimised	Organisasi telah mengintegrasikan MR, Pengendalian internal, dan Tata kelola dengan baik

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemenhub melalui surat Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor PS.302/2/18/ITJEN/2025 tanggal 12 Maret 2025 hal : Hasil Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, nilai Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Padang Tahun 2025 sebesar 11,5 (Level Maturitas 2 / Repeatable). Nilai dimaksud menjadi dasar pertimbangan target kinerja tahun 2026. Sehingga target kinerja indikator **Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang sebesar 12,00**.

Tabel. 4-12 Target Indikator Kinerja Tingkat Penerapan Manajemen Risiko

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	11,50	12,00	12,00	Target kinerja sama dengan target pada Renstra 2025 – 2029.

IKK5.3 Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Teknik Perkeretaapian (skala 0-100) mengacu pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 dengan perhitungannya merupakan penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran, yang nilainya dapat diperoleh pada Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu.

PMK tersebut merupakan perubahan dari PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan tujuan membentuk sinergi antara Monev DJA dan DJPB dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara.

Sinergi yang dilakukan antaranya berupa Penggabungan Regulasi, Menghilangkan Irisan Penilaian, dan Penguatan Sinergi dan Peran.

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori :

- Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;
- 80% – 90% : Kategori Baik;
- 60% – 80% : Kategori Cukup;
- 50% – 60% : Kategori Kurang;
- Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.

NKA = (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran x 50%)

Capaian nilai NKA tahun 2025 sebesar 83,52 menjadi pertimbangan penetapan target kinerja tahun 2026. Sehingga target **Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang sebesar 83,52**.

Tabel. 4-13 Target Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	83,52	83,52	83,52	Target kinerja sama dengan target pada Renstra 2025 – 2029.

IKK5.4 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal mengacu kepada Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan yang kemudian mengalami perubahan melalui Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada 2 unit penilaian yaitu Unit Pengolah (UP) dan Unit Kearsipan (UK). Penilaian dilakukan pada 2 aspek dengan bobot pada masing – masing unit sebagai berikut :

- Unit Pengolah (UP)

- Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (Bobor 70%)
- Aspek Sumber Daya Kearsipan (Bobot 30%)

- Unit Kearsipan (UK)
  - Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (Bobot 60%)
  - Aspek Sumber Daya Kearsipan (Bobot 40%)

$$Nilai\ Pengawasan\ Kearsipan\ Internal = \frac{Nilai\ Unit\ Pengolah\ Kearsipan + Nilai\ Unit\ Kearsipan}{2} \times 100\%$$

Tabel. 4-14 Kategorisasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Nilai	Kategori	Predikat
> 90 – 100	Kategori AA	Sangat Memuaskan
> 80 – 90	Kategori A	Memuaskan
> 70 – 80	Kategori BB	Sangat Baik
> 60 – 70	Kategori B	Baik
> 50 – 60	Kategori CC	Cukup
> 30 – 50	Kategori C	Kurang
0 – 30	Kategori D	Sangat Kurang

Dengan perolehan nilai pengawasan kearsipan internal sebesar 72,61 pada tahun 2025, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang berhasil menempatkan capaian kinerjanya dalam kategori **Sangat Baik** sesuai dengan klasifikasi hasil pengawasan kearsipan yang berlaku. Nilai dimaksud menjadi salah satu dasar pertimbangan penetapan target kinerja tahun 2026.

Tabel. 4-15 Target Indikator Kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	72,61	73	73	Target kinerja sama dengan target pada Renstra 2025 – 2029.

IKK5.5 Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang

Capaian Persentase Realisasi PNBP tahun 2025 sebesar 100% menjadi pertimbangan penetapan target kinerja tahun 2026. Sehingga target **Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang sebesar 100%**.

Tabel. 4-16 Target Indikator Kinerja Persentase Realisasi PNBP

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	CAPAIAN 2025	TARGET		JUSTIFIKASI
			RENSTRA	PK 2026	
Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100	100	100	Target kinerja sama dengan target pada Renstra 2025 – 2029. Nilai PNBP yang ditargetkan sebesar Rp. 3.182.000.000,-.

4.6 Rencana Anggaran

Berdasarkan usulan kebutuhan anggaran, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 184.578.635.000,-.

Rincian Rencana Kegiatan Anggaran yang dianggarkan untuk semua kegiatan yang dilaksanakan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang tahun 2026 pada tabel berikut :

Tabel. 4-17 Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2026

KEGIATAN	URAIAN	PAGU ANGGARAN
4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	15.000.000.000
4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	136.259.802.000
4643	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	1.500.000.000
4600	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	3.354.929.000
4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	28.463.904.000

Tabel. 4-18 Alokasi Anggaran 2026 Berdasarkan Klasifikasi Jenis Belanja

Tahun	Klasifikasi Jenis Belanja		Alokasi Anggaran
2026	Belanja Pegawai		13.455.728.000
	Belanja Barang Operasional		5.619.817.000
	Belanja Barang Non - Operasional		91.573.071.000
	Belanja Modal	Rupiah Murni (RM)	73.930.019.000
		SBSN	-
	Total		**184.578.635.000**

Gambar. 4-1 Nilai Alokasi Anggaran Tahun 2026

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2026 merupakan dokumen awal dari penyelenggaraan SAKIP pada Tahun 2026. Penyusunan dokumen RKT berdasarkan Draft Renstra BTP Kelas II Padang Tahun 2025 – 2029 dengan mempertimbangkan alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penetapan target pada unit kerja disusun berdasarkan baseline kinerja tahun 2025, kebutuhan anggaran, proyeksi pertumbuhan angkutan perkeretaapian, serta kondisi strategis terkini di wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang. Dokumen RKT ini nantinya akan diturunkan kedalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorintasi kepada hasil.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUN 2026
BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS II PADANG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Konektivitas Prasarana Perkeretaapian	Rasio Konektivitas Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Rasio	0.35
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Mendukung Pelayanan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Persentase Pengoperasian Jalur KA yang Sesuai dengan TQI kategori I dan II di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	87.43
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Pemenuhan Target Angkutan Kereta Api di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	37.81
		Persentase Realisasi Perjalanan Kereta Api Perintis di Wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	-
		Persentase Penurunan Kejadian Gangguan operasional perjalanan kereta api pada Perlintasan Sebidang	%	10
4	Meningkatnya Keselamatan transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Tingkat Keselamatan Transportasi Perkeretaapian di wilayah Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	%	100
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai AKIP Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	82.5
		Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	12

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	83.52
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian	%	100
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang	Nilai	73

Padang, Desember 2025
Kepala Balai Teknik Perkeretaapian
Kelas II Padang

Hendrialdi, A.T.D., M.T.
NIP 197007291994031003